



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIMAS KAUTSAR
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN FASILITAS PERSIDANGAN
3. NHK : 111983

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 450.000.000

1. Bangunan Seluas 29 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 151.861.300

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 4.700.000
2. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 98.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SKUTER MATIC NMAX 155 Tahun 2017,
HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. LAINNYA, 3SIXTY SEPEDA LIPAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 6.978.800
5. MOTOR, YAMAHA FAZZIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
22.182.500

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 230.109.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 28.155.980

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 78.045.985

F. HARTA LAINNYA Rp. 51.000.000

Sub Total Rp. 989.172.265

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 989.172.265

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.